

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Peranan

1. Pengertian peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan didefinisikan sebagai tindakan yang mempunyai pengaruh hingga suatu peran yang dimainkan sangat penting.¹ Karena setiap orang dalam masyarakat adalah aktor potensial, istilah "peran" dapat dilihat sebagai atribut yang dihasilkan dari status dan perilaku yang diharapkan anggota masyarakat lain dari pemegang status. Dengan kata lain, peran hanyalah komponen status peran yang dapat dipilih dengan cermat. Pekerjaan utama yang perlu diselesaikan meliputi peran sebagai komponen.² Komponen dinamis dari posisi adalah peran (status). Seseorang berperan ketika menjalankan tugasnya sesuai dengan posisinya. Tidak ada posisi atau peran yang bisa ada tanpa yang lain..

Menurut Soejono Soekanto, peran seseorang merupakan ciri dinamis dari jabatannya ketika menjalankan tugas yang terkait dengan jabatan tersebut. Peran itu sendiri kemudian memiliki dua arti, yaitu bahwa setiap orang memiliki berbagai peran yang dihasilkan dari pola kehidupan sosialnya. Selain itu, ini menyiratkan bahwa peluang yang diberikan komunitas kepadanya dan hal-hal yang dia lakukan untuk komunitas ditentukan oleh fungsinya.³

¹ W.j.s Prwa Parmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) cet ke- 16

² Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 102

³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 268

Istilah "peran" lebih berkaitan dengan proses, penyesuaian, dan fungsi. Seorang individu begitu berperan dan memegang posisi dalam masyarakat. Ada tiga poin menjadi bagian dari peran, ialah:

- a. Peran mencakup konvensi sosial yang berkaitan dengan status atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat pedoman untuk melakukan kehidupan sosial seseorang.
- b. Gagasan tentang peran mengacu pada apa yang dapat disumbangkan orang kepada masyarakat secara keseluruhan.
- c. Cara lain untuk menggambarkan peran adalah sebagai perilaku pribadi yang sangat penting bagi tatanan sosial masyarakat..

Penting untuk membedakan antara peran inheren seseorang dan tempatnya dalam interaksi sosial. Posisi dalam sebuah organisasi merupakan indikator statis dari posisi seseorang dalam lembaga-lembaga sipil.

2. Jenis-Jenis Peranan

Ada tiga jenis peran yang berbeda, ialah:

- a. Seseorang atau lembaga yang bertindak dalam peran normatif melakukannya sesuai dengan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana orang harus menjalani kehidupan mereka.
- b. Peran ideal adalah peran yang dimainkan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan nilai-nilai ideal atau apa yang sesuai dengan posisinya dalam sistem.

- c. Peran faktual adalah peran yang dimainkan oleh seseorang atau organisasi dan didasarkan pada fakta aktual dari suatu situasi atau interaksi sosial dunia nyata.

B. Pemberdayaan

1. Teori Pemberdayaan

Alokasi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat, berjalannya sistem organisasi, dan mekanisme pertahanan sosial semuanya tercakup dalam teori dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Filosofi pemberdayaan masyarakat menawarkan rekomendasi untuk apa yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu. Teori konstruktivisme adalah teori yang penulis gunakan dalam kaitannya dengan judul penelitian. Konstruktivisme radikal, sebagaimana dikemukakan oleh Glasersfeld dan dikutip oleh Joni Rusmanto, selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan adalah penerimaan aktif terhadap sesuatu melalui dialog atau akal sehat.¹

Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran yang bersifat generatif memerlukan proses pemberian makna yang dipelajari. Teori konstruktivisme memandang belajar sebagai usaha manusia untuk membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna pengetahuan berdasarkan pengalaman, berbeda dengan teori behavioristik, yang mendefinisikan belajar sebagai proses mekanistik antara stimulus dan respon. Teori konstruktivisme juga menekankan proses daripada produk dalam konsep pembelajarannya. Meskipun hasil

¹Joni Rusmanto, *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2013), hlm. 34.

pembelajaran dinilai sebagai tujuan, proses yang memerlukan strategi dan pendekatan pembelajaran juga dihargai.

Agar masyarakat dapat mengembangkan pemahaman tentang perubahan, pendekatan teori pembelajaran konstruktivis perlu ditanamkan dan diupayakan selama proses pemberdayaan masyarakat. Selama nilai-nilai dalam masyarakat baik dan benar, pemberdayaan masyarakat harus menjaga nilai-nilai itu. Masyarakat sendiri harus membangun dan mengkonstruksi prinsip-prinsip kebersamaan, keikhlasan, kerjasama timbal balik, kejujuran, dan usaha keras untuk membawa perubahan dan menjadi lebih berdaya. Komponen pengetahuan masyarakat perlu diciptakan dan dikonstruksi secara kuat di dalam masyarakat itu sendiri dalam kaitannya dengan gagasan pemberdayaan.

2. Pengertian Pemberdayaan

Dapat dipahami bahwa pemberdayaan berarti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok lemah yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris "*empowerment*".²

Pemberdayaan adalah proses memberi seseorang lebih banyak otoritas pribadi, interpersonal, atau politik sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk mengubah keadaan mereka.³

² Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 9.

³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 68.

Sutoro Eko memaparkan pemberdayaan dalam buku Rahman Mulyawan dengan melihat masyarakat sebagai subjek mandiri bukan sebagai objek penerima manfaat (beneficiaries) yang mengandalkan pemberian dari sumber luar seperti pemerintah. Konteks pemberdayaan, menurut Roebyantho dkk, meliputi:⁴

- a. Pergeseran pola pikir, di mana mereka yang kurang mampu didorong, didukung, dan didesak untuk terlibat dalam norma-norma prososial.
- b. Peningkatan keterlibatan sosial; populasi sasaran kebijakan diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam perumusan definisi situasional yang menjadi dasar pengambilan keputusan maupun pengambilan keputusan itu sendiri. sehingga masyarakat, terutama yang kurang mampu, akan diuntungkan dari arah kemana pertumbuhan itu berlangsung.
- c. Solidaritas sosial; Pemberdayaan memiliki kapasitas untuk membuat kerjasama menjadi bermakna dan untuk membangun kerangka kerja bagi hubungan antara orang atau kelompok berdasarkan sentimen moral dan keyakinan yang dimiliki bersama dan didukung oleh pengalaman emosional yang serupa.
- d. Meningkatkan keadaan ekonomi anggota masyarakat; Melalui pemberdayaan, diharapkan keadaan ekonomi akan membaik dan pendapatan penduduk, khususnya masyarakat miskin, akan meningkat.
- e. Kelembagaan keluarga miskin juga menjadi sasaran utama dalam pengentasan kemiskinan, yang berupaya mengembalikan fungsi keluarga,

⁴ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan*, (Bandung:UNPAD Press, 2016), hlm. 50.

dimana fungsi ini menghilang seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial dan peningkatan pelaksanaan.

- f. Perubahan arah nilai-nilai budaya merupakan salah satu bagian terpenting dari pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, namun membutuhkan proses yang niscaya sulit. Tujuan utama pengentasan kemiskinan adalah untuk bergeser dari orientasi nilai budaya prososial dan menjauhi sifat orang miskin yang diartikan sebagai malas, apatis, dan bodoh serta menghalalkan segala cara.⁵

Kemampuan individu untuk bekerja sama dengan individu lain dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai pemberdayaan dalam konteks masyarakat. Proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat merupakan upaya peningkatan aspek pemberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah yang berada dalam kondisi miskin dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan.⁶

Modifikasi sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan penuh dapat dicapai adalah di antara elemen-elemen yang menentukan yang mempengaruhi proses pemberdayaan. Oleh karena itu, unsur terpenting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sistem sosial dan struktur sosial masyarakat.

⁵ Haryati Roebyantho Dkk, *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*, (Jakarta: P3KS Press, 2011), hlm. 36.

⁶ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1

3. Pemberdayaan Menurut Pandangan Islam

Islam adalah agama yang memberikan penekanan kuat pada tanggung jawab sosial karena ia menyatakan bahwa tujuan dari setiap ritual Islam adalah untuk menegakkan tanggung jawab sosial dan bahwa Islam tidak akan berarti tanpanya.⁷ Akibatnya, implikasi sosial sekarang menjadi sumber kesadaran bagi semua masyarakat dan dihargai sebagai cara berpikir tentang konteks sosial (*attitude of concern*). Pemberdayaan masyarakat akan lahir dari pandangan welas asih ini. Menurut paradigma Islam, yang melihat dirinya sebagai agama gerakan dan perubahan, pemberdayaan dipandang sebagai gerakan yang tidak pernah berakhir dalam Islam.

Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat adalah aktualisasi keberadaan manusia baik pada tingkat individu maupun kelompok. Oleh karena itu, manusia atau masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai standar normatif, menempatkan gagasan pemberdayaan masyarakat sebagai komponen integral dari upaya untuk menciptakan keberadaan manusia sebagai individu, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai tindakan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagaimana Islam juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rad ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Terjemahan: “Bagi (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu

⁷ Naich Mahendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Karya, 2001), hlm. 38.

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁸

Menurut Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) yang mengutip Tafsir Al-Azhar jilid 5 ayat 11 Surat Ar-Rad artinya Allah sengaja mengutus para malaikat untuk menjaga umat manusia dan masing-masing hewan tersebut secara bergiliran. Akibatnya, dinyatakan dalam berbagai hadis bahwa makhluk itu dilindungi oleh malaikat. Malaikat dengan nama Raqib dan 'Atid mengawasi bagaimana orang melakukan beramal.

Hubungan dengan Alquran kemudian menjadi jelas: "Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat terkenal ini berbicara tentang otoritas dan alasan yang telah diberikan Allah kepada manusia, memungkinkan mereka untuk bertindak secara mandiri dan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Dalam parameter yang telah Allah tetapkan, dia memerintah atas dirinya sendiri. Allah telah menganugerahkan manusia dengan kecerdasan, dan dia cukup bijaksana untuk menimbang yang baik dan yang buruk dalam pikirannya. Manusia tidak seperti batu yang dijatuhkan di pinggir jalan atau seperti sejenis kapas yang ditiup angin kemana-mana. Dia termotivasi dan memiliki alasan yang baik untuk ingin melakukan yang lebih baik. dalam batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Jika

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Penerbit Sabiq, 2009), hlm. 198.

tidak, tidak akan sampai seseorang mendapat kehormatan melayani sebagai Khalifah Allah di Bumi.

Sebuah hadits yang meriwayatkan Marfu dari Ibnu Abi Hatim menyatakan bahwa Allah pernah menurunkan kepada seorang Nabi dari kalangan Bani Israil:

"Katakanlah kepada kaum engkau, bahwa tidak ada dari penduduk suatu dusun atau

قُلْ لِقَوْمِكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُونَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ
فِيَتَحَوَّلُونَ إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا حَوْلَ اللَّهِ عَنْهُمْ مَا يُحِبُّونَ إِلَى مَا كَرَهُونَ

penghuni sebuah rumah yang selalu dalam taat kepada Allah, lalu berputar menjadi membuat maksiat kepada Allah, melainkan akan diputar Tuhan pula keadaannya daripada yang mereka cintai kepada yang mereka tidak menyukainya."

Seperti penjelasan hadist diatas telah nampak bahwa pertukaran nasib dari baik kepada buruk ialah setelah yang bersangkutan menukar haluan hidupnya pula dari yang baik kepada yang buruk.⁹

4. Tujuan Pemberdayaan

Menciptakan manusia dan komunitas yang mandiri adalah tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Kemandirian ini meluas ke bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan mengelola tindakan mereka. Kemandirian masyarakat adalah keadaan di mana anggota masyarakat memiliki kapasitas untuk menalar, membuat pilihan, dan mengambil tindakan yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 5, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2002), hlm 3740.

Jenis keterampilan berikut ini penting untuk efektivitas pelaku pemberdayaan:

- a. Kapasitas untuk mengenali peluang.
- b. Kapasitas untuk membuat pilihan dan melaksanakan tindakan yang diprioritaskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan untuk menyumbangkan ide dan sumber daya untuk proses pembangunan.
- c. Kapasitas untuk mempromosikan inovasi dan memperluas audiens untuk program-program yang ditujukan bagi mereka yang kurang mampu.
- d. Kapasitas untuk bertindak sebagai katalis atau mendorong kapasitas masyarakat untuk maju melalui penggunaan asetnya sendiri.¹⁰

Tujuan pemberdayaan masyarakat, menurut Sumaryadi dalam Rahman Mulyawan, adalah:¹¹

- a. Membantu pembangunan manusia yang sejati dan integral dari masyarakat yang lemah, rentan, kecil, dan kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, masyarakat terbelakang, dan buruh tani.
- b. Memberikan kelompok masyarakat ini sumber daya sosial ekonomi yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, menjadi lebih mandiri, dan mengambil peran aktif dalam pengembangan masyarakat.

Sementara itu, Edi Suharto menegaskan bahwa tujuan utama pemberdayaan

¹⁰ Tjokrowinoto, *Bentuk-Bentuk Kemampuan yang Relevan dengan Kualitas Pelaku Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 62

¹¹ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan*, (Bandung: UNPAD Press, 2016), hlm. 71.

masyarakat adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok lemah yang tidak berdaya karena faktor internal (seperti persepsi mereka sendiri) atau faktor eksternal (misalnya tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Menurut Payne dalam Andeas dan Safitri, tujuan utama pemberdayaan adalah memberi klien kemampuan untuk memutuskan sendiri tindakan apa yang harus diambil dan bagaimana melanjutkannya, termasuk meminimalkan dampak hambatan sosial dan pribadi.¹²

Tujuan pemberdayaan, menurut Mardikanto dan Poerwoko, mencakup beberapa inisiatif perbaikan, antara lain:

- a. Pendidikan yang lebih baik memerlukan desain pemberdayaan sebagai jenis pendidikan yang lebih baik. Yang harus diperhatikan sama pentingnya adalah bagaimana kemajuan pendidikan nonformal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batasan waktu dan usia. Perbaikan pendidikan nonformal dalam proses pemberdayaan lebih dari sekedar perbaikan materi, metode, waktu dan tempat, serta hubungan antara fasilitator dan penerima manfaat.
- b. Peningkatan aksesibilitas berarti bahwa dengan berkembang dan matangnya budaya belajar sepanjang hayat, diharapkan aksesibilitas akan meningkat, terutama aksesibilitas terhadap sumber pengetahuan atau inovasi, sumber pendanaan atau keuangan, pemasok barang dan

¹² Andeas dan Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Sahila Yogyakarta, 2016), hlm. 25.

jasa, dan organisasi pemasaran.

- c. Peningkatan tindakan (*better action*) didefinisikan sebagai pengembangan tindakan yang lebih baik melalui penyediaan pendidikan yang lebih baik dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya yang lebih baik (SDM, sumber daya alam, dan sumber daya lain atau buatan).
- d. Peningkatan pendapatan (*better income*) mengacu pada harapan bahwa perubahan cara perusahaan dilakukan akan mampu meningkatkan tingkat pendapatan individu serta tingkat pendapatan keluarga dan masyarakat.
- e. Ungkapan “kehidupan yang lebih baik” mengacu pada harapan bahwa jumlah pendapatan yang cukup dan lingkungan yang sehat akan meningkatkan taraf hidup setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Kondisi kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik sama dengan masyarakat yang lebih baik.

5. Prinsip Pemberdayaan

a. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah disusun dan disepakati bersama seluruh tim kerja, baik pelaksana maupun kelompok sasaran, maka setiap manusia yang ingin berhasil dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan harus memiliki prinsip dalam bekerja. Agar kegiatan pemberdayaan, khususnya yang ditujukan kepada masyarakat dapat berjalan

dengan baik dan benar, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan, petugas/pelaku pemberdayaan harus mengenal beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat. Berikut ini beberapa prinsip panduan pemberdayaan masyarakat:

1. Karena setiap komunitas memiliki masalah, kebutuhan, dan potensi yang unik, mereka semua memiliki hak yang sama untuk diberdayakan. Pemberdayaan dilakukan secara demokratis, dengan segala keikhlasan, dan tanpa menggunakan paksaan.
2. Kebutuhan, isu, dan potensi kelompok sasaran harus menjadi landasan bagi setiap inisiatif pemberdayaan masyarakat. Jika kelompok sasaran terlibat penuh dalam proses identifikasi dan sosialisasi sejak dini, hal ini dapat diamati dengan jelas.
3. Karena masyarakat merupakan sasaran utama pemberdayaan, maka masyarakat harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan dan menjadi landasan utama untuk menetapkan tujuan, strategi, dan modus kegiatan pemberdayaan.
4. Mengembalikan nilai-nilai budaya dan pengetahuan tradisional, seperti semangat gotong royong, rasa hormat orang tua kepada pemuda, dan kecintaan pemuda kepada orang tua, karena hal-hal tersebut merupakan modal sosial bagi pembangunan..
5. Dilakukan secara bertahap dan terus menerus karena merupakan proses yang panjang, dan dilakukan secara rasional dan lugas untuk mengarah pada topik yang lebih rumit.
6. Memperhatikan keragaman sifat, budaya, dan adat istiadat yang

diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap melekat di masyarakat.

7. Memperhatikan semua aspek kehidupan lokal, terutama aspek sosial dan ekonomi.
8. Diskriminasi, terutama terhadap perempuan, tidak ada.
9. Gunakan proses pengambilan keputusan partisipatif untuk membuat keputusan tentang waktu, bahan, jenis kegiatan, dan masalah lainnya.

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai cara, baik secara fisik (materi, tenaga, dan materi) maupun secara virtual (saran, waktu, dukungan).¹³

C. Masyarakat Nelayan

1. Pengertian Masyarakat Nelayan

Istilah "komunitas nelayan" adalah gabungan dari "komunitas" dan "nelayan". Sekelompok orang yang saling bergantung satu sama lain dan berbagi ruang bersama disebut masyarakat. Dalam masyarakat, ada tiga komponen utama: individu dan kelompok orang yang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda, wilayah atau tempat di mana mereka tinggal, dan kegiatan yang mereka lakukan secara individu atau sebagai kelompok.¹⁴

Sebaliknya, nelayan didefinisikan sebagai orang yang secara aktif menangkap ikan untuk mencari nafkah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam ensiklopedia bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencaharian dan mata

¹³ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Alfabet: Bandung, 2014), hlm. 58.

¹⁴ Ayub. M. *Pandangan, Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari, Unhalu Press, 2011), hlm. 30.

pencapaian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Penduduk masyarakat atau pantai yang menggantungkan mata pencahariannya pada laut dikenal sebagai nelayan. Suatu komunitas yang seluruhnya atau sebagian bergantung pada penangkapan ikan atau kehidupan laut lainnya disebut sebagai "nelayan". Dari beberapa definisi "nelayan" di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan terdiri dari individu-individu yang bertempat tinggal di sepanjang pantai dan menghabiskan seluruh atau sebagian waktunya bekerja sebagai nelayan di laut.

2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Memanfaatkan potensi sumber daya mereka untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, masyarakat nelayan dapat mengembangkan kemandirian sosial, ekonomi, dan politik mereka, itulah yang dimaksud dengan "pemberdayaan nelayan". Menyelenggarakan tindakan pengelolaan sumber daya pesisir dengan bantuan organisasi dari sektor bisnis, pemerintah, dan non-pemerintah yang terkait dengan pengelolaan pesisir.

Kemiskinan alami berkembang sebagai akibat dari kurangnya sumber daya atau tingkat teknologi yang sangat primitif. Ini termasuk kemiskinan yang disebabkan oleh populasi yang berkembang dengan cepat sementara sumber daya tetap cukup stabil. Keterkaitan antara terumbu karang dan ekosistem mangrove yang rusak dengan tingkat pendapatan nelayan adalah contoh yang sering dikutip sebagai acuan untuk menggambarkan masalah ini.¹⁵ Semakin panjang garis pantai, Indonesia akan semakin miskin. Secara umum, banyak kantong-kantong kemiskinan desa-desa nelayan di pesisir Indonesia.

¹⁵ Mochammad Nadjib, *Sistem Pembiayaan Nelayan*, (Jakarta: LIPI Press, 2013), hlm. 20

Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menerapkan inisiatif pembalikan pembangunan seperti Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) untuk mengurangi jumlah kota pesisir yang miskin secara signifikan. Potensi peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir merupakan masalah nyata lainnya yang perlu diperhatikan.¹⁶

Oleh karena itu, masyarakat pesisir sangat membutuhkan pemberdayaan masyarakat nelayan. Pada hakekatnya tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial budaya yang menjadi landasan pembangunan wilayah pesisir. Mendukung keunggulan sumber daya manusia dan operasi ideal lembaga sosial ekonomi dalam kehidupan warga negara sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Akibatnya, penting untuk merencanakan dan menetapkan tujuan terukur yang harus dicapai secara bertahap. Mengingat kapasitas sumber daya pembangunan yang dikuasai oleh masyarakat pesisir.¹⁷ Tujuan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik jika terjadi interaksi antara masyarakat dan pemerintah setempat dalam pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan.

Inisiatif pemberdayaan, seperti berikut ini, dapat dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan.

- a. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas. Untuk mencegah tuntutan masyarakat yang

¹⁶ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: ArRuzz, 2009), hlm. 28

¹⁷Kusnadi, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 39.

tidak selaras dalam menerapkan ilmu yang mereka peroleh untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, program pendidikan dan pelatihan untuk desa-desa nelayan dan pembudidaya ikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan lokal. Untuk menjadikan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai vokasi utama yang membanggakan generasi penerus, maka generasi muda (khususnya keturunan nelayan dan pembudidaya ikan) harus memiliki keahlian dan penguasaan teknologi penangkapan.

- b. Mentoring dan konseling. Nelayan dan pembudidaya ikan membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menangani masalah di komunitas lokal mereka. Blok bangunan fundamental dari pemberdayaan itu sendiri adalah keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekitar mereka. Penyuluh sangat penting untuk menanamkan rasa kemandirian dalam masyarakat dan organisasi masyarakat. Memberikan dukungan kepada nelayan dan pembudidaya ikan agar mereka dapat menemukan dan memanfaatkan sepenuhnya potensi diri serta potensi lingkungan tempat tinggalnya. mendorong orang dan kelompok untuk mencari kemungkinan untuk memperbaiki keadaan mereka.
- c. Kemitraan untuk bisnis di bidang perikanan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mendukung kemitraan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam rangka penguatan kapasitas usaha kecil untuk menjadi mandiri dan tangguh dalam

pemberdayaan. Dalam industri perikanan, kemitraan digunakan untuk memberikan akses keuangan kepada nelayan dan pembudidaya ikan, peluang pemasaran produk, pengembangan sumber daya manusia, dan teknologi. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menciptakan peluang usaha bagi masyarakat setempat, kelompok nelayan, dan pembudidaya ikan kecil dapat dilakukan dengan menciptakan peluang bagi pelaku usaha, pemilik kapal, dan lembaga keuangan bagi nelayan kecil. Setelah itu, kerjasama kemitraan dapat dilakukan dengan pemilik lahan untuk pembudidaya ikan kecil.

- d. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Keterbatasan modal terkait pemenuhan sarana dan prasarana produksi perikanan akan terus menjadi tantangan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Selain itu, ada masalah dengan suku bunga pinjaman yang tinggi dan sulitnya nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi standar aplikasi kredit. Badan usaha swasta dapat membantu mengatasi kekurangan keuangan yang dialami nelayan dan pembudidaya ikan dengan menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka untuk mendanai bantuan modal bagi mereka sebagai bagian dari kewajiban sosial mereka kepada masyarakat. Tentu saja, masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dapat mengelola modal ini secara kolektif dengan bantuan penyuluh, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan etis.
- e. Aksesibilitas informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu

- penentu utama efektivitas pemberdayaan adalah aksesibilitas kelembagaan untuk membangun sumber daya manusia, teknologi, dan sumber informasi yang kuat. Penting untuk menginformasikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan baru yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka.
- f. Kelembagaan pembudidayaan ikan dan nelayan. Pentingnya kelembagaan yang dijunjung tinggi oleh nelayan dan pembudidaya ikan, agar kepentingan dan tujuan yang telah disepakati bersama dapat terlaksana secara efektif, serta kemampuan lembaga atau organisasi tersebut untuk menunjukkan kemampuan masyarakat dalam bekerjasama dalam memobilisasi sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. nelayan lokal dan pembudidaya ikan Peran individu, kelompok, pemerintah, dan organisasi atau lembaga yang berasal dari masyarakat tidak dapat dipisahkan darinya.¹⁸

3. Karakteristik Masyarakat Nelayan

Secara sederhana, komunitas nelayan berbeda dari kelompok lain dalam hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik di bawah ini

- a. Mereka homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dan budaya, serta sikap dan perilaku.
- b. Berpura-pura keras.
- c. Jadilah pengertian orang lain.

¹⁸ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.58.

- d. Menampilkan gairah seksual yang cukup besar.
- e. Hubungan anggota lebih dekat dan memiliki rasa dukungan yang kuat.
- f. Suara cenderung meninggi saat berbicara.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah atau sumber lain yang digunakan penelitian sebagai pembandingan terhadap peneliti yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, peneliti mengemukakan karya ilmiah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

1. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar menjadi topik skripsi tahun 2017 oleh Kaswandi.¹⁹ Metodologi penelitian kualitatif diterapkan. Temuan kajiannya menunjukkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, Pemkab Takalar telah melakukan berbagai langkah untuk memberdayakan nelayan.

Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan. Perbedaan antara penelitian dengan keduanya terletak pada obyeknya. Peneliti memilih obyek di Kabupaten Takalar maka penulis memilih obyek di Kabupaten Nias Barat. Serta penulis meneliti tentang peranan Dinas Kelautan dan Perikanan.

¹⁹ Kaswandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar*, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar (Juni 2017).

2. Skripsi Taufik, “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”.²⁰ Metodologi penelitian kualitatif diterapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat pesisir di Kabupaten Polewali melalui inisiatif pemberdayaan telah dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum. Meskipun sosialisasi perangkat lunak ini mengalami sedikit kurangnya koordinasi. Dana bantuan tersebut berguna untuk menyelesaikan masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produksi nelayan.

Perbedaannya, dalam penelitian ini membahas mengenai Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, sedangkan yang akan penulis bahas adalah mengenai Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nelayan.

3. Sipahelut²¹ tahun 2010 dalam skripsi nya yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan nelayan dan implikasi dari program PEMP pada masyarakat nelayan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang

²⁰ Taufik, *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2016).

²¹ Sipahelut, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Skripsi Institut Bogor (2010).

menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Penelitian ini dilakukan dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan program PEMP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan sehingga dapat merubah status nelayan buruh menjadi nelayan pemilik.

Perbedaannya, dalam penelitian ini membahas mengenai strategi dari PEMB dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, sedangkan yang akan penulis angkat mengenai peranan Dinas Kelautan dan Perikanan, juga obyek tempat penelitian berbeda.